PRAKTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI: STUDI KASUS PADA KOPERASI KARYAWAN KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

Oleh:

Widodo Ramadyanto[1]

Abstraksi

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Seperti badan usaha lain, koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi berpedoman pada PSAK No. 27, sedangkan yang bersifat umum diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain. Keadaan ini mungkin membuat manajemen koperasi menjadi kurang mengerti bagaimana membuat pembukuan secara benar sesuai dengan PSAK. Hal tersebut terutama dialami oleh koperasi menengah dan kecil yang berlokasi di desa atau di kota kecil.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda *(the dual identity of the member)* pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi *(user own oriented firm)*.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunanya.

[1] Staf pada Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, BAPEKKI (widodora@gmail.com)

1. Basis Akuntansi

Koperasi Primer Republik Indonesia (KPRI) Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara, untuk memudahkan akan disingkat menjadi KPRI, belum menggunakan basis kas. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi secara campuran antara basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk mengakui pendapatan. Pendapatan diakui pada saat kas diterima. Basis akrual dipakai untuk mengakui beban penyusutan aktiva tetap. Basis akrual juga diakui untuk mengakui beban resiko kredit. Beban-beban lainnya diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat dikeluarkannya kas.

2. Pengakuan Pendapatan dan Penetapan Beban

KPRI belum memisahkan jasa atau pendapatan yang timbul akibat adanya transaksi dengan anggota dan non anggota. Beban yang terjadi juga tidak dipisahkan antara beban yang timbul antara transaksi dengan anggota maupun dengan non anggota. Beban yang terjadi juga belum dibedakan antara beban usaha dan beban-beban perkoperasian.

a. Unit Simpan Pinjam

Pendapatan unit simpan pinjam diakui pada saat kas diterima dari bendaharawan pemotong gaji sebesar nilai nominalnya. Beban diakui pada saat kas dikeluarkan sebesar kas yang benar-benar dikeluarkan. Dalam pembukuan KPRI pada tahun 2001, terdapat perkiraan beban lain-lain yang termasuk di dalamnya adalah biaya gambar gedung pada bulan Agustus.

b. Unit Usaha Penjualan Sepeda Motor

Unit usaha ini melakukan pembukuan tersendiri yang terpisah dari pembukuan KPRI yang pada akhir tahun dikonsolidasikan dengan pembukuan KPRI. Pendapatan diakui pada saat kas diterima dari bendaharawan pemotong gaji sebesar nilai nominalnya. Pendapatan yang terjadi dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Jasa Piutang Sepeda Motor.

   Pendapatan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor kepada anggota secara kredit

b) Jasa Penjualan Sepeda motor.

   Pendapatan yang diterima dari *fee* yang diterima dari *dealer* sepeda motor.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan sebesar nilai nominalnya. Selisih antara pendapatan dan biaya-biaya dicatat sebagai SHU yang ditahan. SHU yang ditahan tersebut kemudian ditambahkan ke modal unit penjualan sepeda motor.

c. Unit Usaha Wartel

Unit wartel melakukan pembukuan tersendiri yang terpisah dengan unit induk, yaitu unit simpan pinjam. Namun pada akhir tahun pendapatan tersebut dikonsolidasikan dengan pendapatan KPRI.

Sebulan sekali setelah unit wartel mendapatkan tagihan telepon, dibuat Laporan Penghitungan Hasil Usaha koperasi. Hasil usaha wartel dihitung dengan cara menjumlah pendapatan selama satu bulan, kemudian mengurangkannya dengan tagihan dari PT Telkom dan beban beban yang terjadi pada periode tersebut.

Dalam laporan keuangan unit wartel tidak terdapat perkiraan beban penyusutan aktiva tetap walaupun KPRI mempunyai aktiva tetap.

3. Perlakuan Aktiva

Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak tertagih, KPRI mengakuinya sebagai beban dan memasukkannya dalam Beban Dana Resiko Kredit. Beban tersebut biasanya terjadi karena terdapat anggota yang tidak dapat membayar piutangnya karena meninggal dunia.

Dalam perkiraan aktiva lancar terdapat perkiraan pengadaan sepeda motor. Perkiraan ini merupakan piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada unit usaha penjualan sepeda motor untuk membeli sepeda motor ke *dealer* secara tunai. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominalnya. Piutang ini dalam neraca unit usaha penjualan sepeda motor disajikan sebagai ekuitas.

Investasi jangka panjang yang berupa Simpanan Pokok PKP-RI, Simpanan Wajib PKP-RI, Simpanan Tambah Modal PKP-RI, dan Simpanan Khusus Pendirian Bank (SKPB) tidak memberikan *return* setiap tahun. *Return* yang dihasilkan tidak diberikan secara periodik. Investsi tersebut bila memberikan *return,* maka oleh PKP-RI dihitung sebagai penambahan simpanan, jadi KPRI tidak menerimanya secara tunai. Surat Berharga Persijap belum pernah memberikan *return.*

Aktiva tetap dicatat pada Buku Inventaris pada saat aktiva tersebut diterima oleh KPRI. KPRI mengklasifikasikan aktiva tetapnya menjadi tiga kategori, yaitu tanah, gedung dan inventaris. Aktiva tetap-kecuali pada unit wartel- dicatat berdasarkan harga perolehan aktiva tetap tesebut dikurangi perkiraan penyusutan yang telah terjadi.

Kebijakan penyusutan aktiva tetap adalah dengan menggunakan *straight line method* tanpa nilai sisa untuk semua aktiva tetap kecuali tanah. Bangunan disusutkan selama empat puluh tahun, sedangkan inventaris disusutkan selama lima sampai sepuluh tahun.

Pengeluaran–pengeluaran setelah perolehan gedung yang digunakan untuk penambahan fisik gedung dan pengembangan lingkungannya seperti pengembangan tempat parkir dimasukkan dalam Beban Pembangunan Gedung. Pengeluaran–pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap, yang berupa beban-beban untuk

perbaikan dan perawatan untuk mempertahankan aktiva tetap dalam kondisi operasi koperasi tersebut, diakui sebagai beban pemeliharaan pada periode terjadi pengeluaran kasnya.

4. Perlakuan Kewajiban

Secara garis besar, KPRI membagi kewajibannya menjadi dua golongan yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. KPRI sudah memisahkan antara kewajiban yang berasal dari transaksi dengan anggota dan transaki non-anggota. Hal tersebut tergambarkan secara eksplisit dalam neraca KPRI.

5. Perlakuan Ekuitas

KPRI mempunyai kekayaan bersih yang berasal dari:

a. Modal yang berasal dari anggota. Dicatat sebesar nilai nominalnya.
b. Modal yang berasal dari sumbangan atau Modal Donasi, diakui pada saat penyerahan kepemilikan sebesar nilai nominal yang diterima.
c. Modal yang sudah diapropriasikan atau dicadangkan penggunaan. Dicatat sebesar nilai nominalnya.

6. Laporan Keuangan

KPRI menyusun laporan keuangan yang terdiri atas:

a. Neraca,
b. Perhitungan Hasil Usaha,
c. Laporan Perhitungan Usaha Perbandingan

B. Tujuan

Penulisan artikel ini bertujuan :

1) Untuk mengetahui praktek akuntansi yang diterapkan pada koperasi
2) Untuk menentukan standar akuntansi yang dapat diterapkan pada koperasi.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi Koperasi Primer Republik Indonesia (KPRI) Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pengurus dan karyawan koperasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan yang berkaitan, artikel-artikel, catatan-catatan kuliah, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan.

Data yang diperoleh kemudian diolah untuk mencari praktek akuntansi yang dipakai. Setelah prakteknya diketahui, kemudian dibandingkan dengan standar akuntansi yang berkaitan. Apabila standar akuntasinya di Indonesia belum ada, maka dipergunakan standar akuntasi Internasional (IAS) atau teori akuntansi yang diterima secara umum.

III. Landasan Teori

A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang disyaratkan dalam menyusun laporan keuangan, termasuk koperasi adalah basis akrual. Pendapatan dilaporkan pada periode dimana pendapatan diperoleh (*earned*). Beban dilaporkan pada periode dimana beban tersebut dialami (*incurred*) dalam mendapatkan pendapatan.

B. Pengakuan Pendapatan dan Penetapan Beban Koperasi

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota[2].

Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh badan usaha koperasi yang tidak dikeluarkan oleh badan usaha dengan bentuk lain.

Pendapatan dan beban bunga yang timbul diakui secara accrual (*accrual basis*) kecuali pendapatan dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang "non performing". Pendapatan dari aktiva yang non performing hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.[3]

Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi, atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan *(funding)*.

Metode pembukuan penjualan sepeda motor dapat dilakukan dengan *installment sales method*. Harga pokok penjualan ditangguhkan untuk dibandingkan dengan bagian tersebut pada tiap penerimaan kas. Saat kas diterima, sebagian dari penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan sebesar tingkat laba kotor dikalikan dengan jumlah kas yang diterima.[4]

---

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999) par. 67-69.

[3]Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31,* "Akuntansi Perbankan," par. 02.

[4]Jay M. Smith dan K. Fred Skousen, *Intermediate Accounting*, edisi ke-11 (Cincinnati: South-Western Publishing, 1992), hal. 769.

Bagian bunga dalam pembayaran yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima dan jumlah total pembayaran yang diterima diakui sebagai penerimaan dari penjualan kredit.[5]

C. Perlakuan Aktiva

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak tertagih, yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Metode penyisihan piutang tak tertagih, dilakukan dengan cara membuat perkiraan piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus, sedangkan metode penghapusan langsung mengakui beban hanya pada saat piutang tersebut dianggap benar-benar tak tertagih.

Investasi jangka panjang harus dicatat pada neraca berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen. Apabila penurunan nilai tersebut terjadi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut.[6]

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dengan syarat:

1) besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan,
2) biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.[7]

Harga perolehan aktiva terdiri dari harga belinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan dikurangi setiap potongan dagang dan rabat.[8]

Masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang yang diharapkan oleh perusahaan. Estimasi masa manfaat dipertimbangkan berdasarkan pada pengalaman perusahaan dengan aktiva.[9]

D. Perlakuan Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya

---

[5]*Ibid*., hal. 771.
[6]Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13,* "Akuntansi untuk Investasi" (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999)., par. 17.
[7]Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16,* "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain", par. 05-06.
[8]*Ibid*., par 13-14.
[9] *Ibid,* par. 33.

dan dicatat sebesar nilai nominalnya.[10]

E. Perlakuan Ekuitas

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.[11]

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.[12]

Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.[13]

F. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

V. Analisis

A. Basis Akuntansi

Pemakaian basis akuntansi oleh KPRI kurang sesuai karena menggunakan basis campuran. Asumsi dasar yang dipakai oleh laporan keuangan sebagaiman tercantum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar akrual.

KPRI sudah melakukan pengakuan atas terjadinya beban penyusutan atas aktiva tetap yang dimilikinya. Koperasi juga telah memperhitungkan beban piutang tak tertagih atau Beban Resiko Kredit. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tentang pengakuan beban yang diakui secara akrual. Namun pengakuan beban-beban lainnya belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum karena memakai basis kas.

---

[10] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27,*, par. 61.
[11] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27,* par. 37.
[12] *Ibid.,* par. 55.
[13] *Ibid.,* par. 56.

B. Pengakuan Pendapatan dan Penetapan Beban

Pendapatan unit simpan pinjam diakui pada saat kas. Pada akhir tahun tidak diakui adanya piutang bunga untuk mengakui pendapatan bunga secara akrual. Akibatnya, jumlah pendapatan pada akhir tahun lebih kecil. Untuk lebih memberi gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut :

Ilustrasi I:

Pada 6 November 200X, KPRI memberikan kredit jangka pendek sebesar Rp 4.000.000,00. Bunga yang ditetapkan adalah 3% menurun. Angsuran dibayar tiap bulan pada tanggal 6 selama sepuluh bulan.

Jurnal yang dilakukan berdasarkan teori adalah sebagai berikut:

200X			
6 Nov.	Piutang Jangka Pendek.....	4.000.000	
	Kas		4.000.000
	(Untuk mencatat penyaluran kredit)		
6 Nov.	Kas.....	508.000	
	Piutang Jangka Pendek[1].....		400.000
	Pendapatan Bunga[2]		108.000
	(Untuk mencatat pembayaran angsuran pertama)		
6 Des.	Kas	496.000	
	Piutang Jangka Pendek.....	400.000	
	Pendapatan Bunga[3]		96.000
	(Untuk mencatat pembayaran angsuran kedua)		
31 Des.	Piutang Bunga[4].....	67.742	
	Pendapatan Bunga.....		67.742
	(Untuk mengakui pendapatan bunga akrual)		

Perhitungan:

[1] 4.000.000 : 10 = 400.000

[2] 3% x (4.000.000 – 400.000) = 3% x 3.600.000 = 108.000

[3] 3% x (3.600.000 – 400.000) = 3% x 3.200.000 = 96.000

[4] 25/31 x (3% x (3.200.000 – 400.000) = 67.742

Pada akhir tahun sebelum jurnal penutup, saldo *T-accounts*-nya adalah sebagai berikut:

Kas

Awal	4.000.000	4.000.000
	508.000	
	496.000	
Saldo	1.004.000	

Piutang Jangka Pendek

	4.000.000	400.000
Saldo	3.200.000	400.000

Pendapatan Bunga			Piutang Bunga	
		108.000	67.742	
		96.000		
		67.742		
	Saldo	271.742		

Pembukuan yang dilakukan oleh KPRI tidak menggunakan jurnal. Untuk mempermudah pemahaman, digunakan *T-accounts.*

Kas				Piutang Jangka Pendek			
Awal	4.000.000	(1)	4.000.000	(1)	4.000.000	(2)	400.000
(2)	508.000			Saldo	3.200.000	(3)	400.000
(3)	496.000						
Saldo	1.004.000						

Pendapatan Jasa Piutang Jangka Pendek		
	(2)	108.000
	(3)	96.000
	Saldo	204.000

Keterangan:
(1) menyalurkan kredit jangka pendek kepada anggota,
(2) menerima angsuran pertama pada bulan November,
(3) menerima angsuran kedua pada bulan Desember.

Pendapatan menurut metode pertama adalah Rp 271.742,00 sedangkan menurut pembukuan KPRI adalah sebesar Rp 204.000,00. Selisih sebesar Rp 67.742,00, terjadi karena adanya pengakuan bunga secara akrual pada akhir tahun yang dilakukan pada metode pertama. Hal tersebut menyebabkan penyajian pendapatan pada akhir tahun lebih rendah (*understated)* daripada yang seharusnya.

Pada akhir tahun buku tidak ada taksiran piutang yang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapuskan dan dibebankan pada beban dana resiko kredit apabila jelas-jelas diketahui adanya piutang yang tak tertagih tersebut. Kerugian piutang baru diakui pada saat diketahui adanya piutang yang tidak tertagih. Praktek tersebut dapat menunjukkan bahwa KPRI menggunakan metode penghapusan langsung dalam penghapusan piutangnya.

Metode penghapusan langsung tidak dapat menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih dalam neraca. Meskipun demikian, hal tersebut tidak terlalu menimbulkan masalah mengingat pembayaran piutang diterima langsung dipotong dari peminjam. Selama peminjam tersebut masih bekerja sebagai pegawai negeri, pembayarannya dapat terus berlangsung.

Kepada anggota yang keluar, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya, KPRI menetapkan pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar. Pembayaran tambahan tersebut tergantung pada berapa lama yang bersangkutan menjadi anggota. Uang yang keluar dibebankan pada beban kompensasi simpanan anggota. Pemberian tambahan pembayaran tersebut merupakan

distribusi kepada pemilik, sehingga tidak dapat diakui sebagai beban. Perlakuan akuntansi tersebut kurang sesuai dengan ketentuan pada PSAK no. 27, paragraph 56. Pada paragrap tersebut dinyatakan bahwa pembayaran lebih tersebut harus dibebankan pada cadangan.

Pemberian hadiah kepada pemilik simpanan dimasukkan dalam perkiraan Beban Operasional. Beban Pemberian Hadiah merupakan beban yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana, jadi beban tersebut seharusnya dimasukkan dalam Beban Bunga pada periode dikeluarkannya pengeluaran.

THR dimasukkan dalam beban jasa penyimpan. Besarnya THR tidak berdasarkan jumlah simpanan anggota. Mengingat segala pengeluaran dari dan kepada pemilik adalah bukan merupakan beban, maka THR tersebut seharusnya tidak dimasukkan dalam perkiraan beban namun dalam perkiraan kompensasi simpanan anggota pada ekuitas.

Pengeluaran–pengeluaran setelah perolehan gedung yang digunakan untuk penambahan fisik gedung dan pengembangan lingkungannya seperti pengembangan tempat parkir dimasukkan dalam Beban Pembangunan Gedung. Pengeluaran–pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan mengalirkan manfaat ke KPRI pada masa depan, tidak hanya pada periode terjadinya pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan dapat diukur secara andal. Oleh sebab itu, pengeluaran-pengeluaran seharusnya dikategorikan sebagai biaya perolehan aktiva tetap dan disusutkan.

Biaya transportasi pembelian seragam oleh KPRI pada bulan Februari 2001 dimasukkan dalam beban perjalanan rapat. Agar dapat memberikan informasi yang lebih handal, biaya transportasi pembelian seragam seharusnya dimasukkan dalam biaya perolehan seragam.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada biaya transportasi pembelian tenda yang dilakukan pada bulan Maret 2001. Biaya tersebut dimasukkan dalam biaya perjalanan rapat. Seperti halnya biaya transportasi pembelian seragam, biaya transportasi pembelian tenda seharusnya dimasukkan dalam biaya perolehan tenda dan disusutkan.

Beban yang terjadi belum dipisahkan antara beban usaha dengan beban perkoperasian. Biaya pembinaan unit simpan pinjam, dan beban perjalanan pelatihan merupakan biaya perkoperasian. Biaya tersebut oleh KPRI dimasukkan dalam beban perjalanan rapat.

Pada bulan Agustus 2001, KPRI memakai jasa arsitek untuk menggambar dan merancang gedung wartel. Biaya yang dikeluarkan dimasukkan dalam biaya-lain lain untuk periode tahun buku 2001. Biaya perancangan gedung merupakan biaya yang dapat diatribusikan pada gedung, sehingga harus dikapitalisasikan dalam biaya perolehan gedung.

Pendapatan yang diterima berasal dari anggota dan non-anggota tidak dipisahkan. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan

dalam PSAK no. 27.

Metode penghitungan pendapatan unit wartel yang dilakukan seperti penghitungan pendapatan dalam laporan laba rugi perusahaan dagang sudah sesuai dengan ketentuan pada PSAK no. 35. Pendapatan dari fasilitas wartel yang atas tarif pulsa tersebut diakui sebesar jumlah pemakaian sebenarnya selama periode berjalan. Jumlah pemakaian pulsa sebenarnya selama periode berjalan pada hakekatnya adalah harga pokok penjualan jasa telekomunikasi.

Dalam perkiraan beban unit wartel terdapat perkiraan Beban Tabungan Tahun Lalu. Beban tersebut dimaksudkan untuk mencatat pengeluaran untuk membayar kewajiban kepada induk yang terjadi pada tahun sebelumnya. Seharusnya beban tersebut dicatat sebagai kewajiban pada saat terjadinya dan pembayarannya diakui sebagai pembayaran hutang bukan beban.

Pendapatan yang diterima oleh unit sepeda motor dibedakan antara yang berasal dari Jasa Piutang Sepeda Motor dan Jasa Penjualan Sepeda Motor. Pengguna laporan keuangan kemungkinan besar menafsirkan bahwa Jasa Piutang Sepeda Motor berasal dari penjualan sepeda motor secara kredit dan Jasa Penjualan Sepeda Motor adalah merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan sepeda motor yang dilakukan secara non-kredit. Padahal Jasa Penjualan Sepeda motor merupakan pendapatan yang berasal dari *fee* yang diberikan oleh *dealer* sepeda motor. Namun pemisahan tersebut juga mempunyai sisi positif. Dengan adanya pemisahan, maka pengguna laporan keuangan dapat mengetahui darimana kontribusi pendapatan terbesar berasal.

Jumlah piutang sepeda motor adalah sebesar biaya pengadaan sepeda motor, KPRI tidak memperhitungkan adanya *gross profit*. Pendapatan jasa kredit sepeda motor seluruhnya berasal dari bunga angsuran sepeda motor. Pada saat kas angsuran diterima, kas tersebut diakui sebagai Pendapatan Jasa piutang Sepeda Motor dan pembayaran pokok piutang. Pengakuan pendapatan bunga tersebut sebagai pendapatan sudah sesuai.

Harga pokok penjualan sepeda motor adalah sebesar kas yang dibayarkan KPRI untuk memperoleh sepeda motor dari *dealer*. Harga pokok tersebut dicatat sebagai modal pengadaan sepeda motor yang ditempatkan sebagai ekuitas pada neraca lajur unit usaha penjualan motor. Modal pengadaan sepeda motor tersebut pada neraca KPRI disajikan sebagai aktiva lancar. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan perlakuan akuntansi dan dapat membingungkan pengguna laporan keuangan.

Modal pengadaan sepeda motor diperoleh unit usaha penjualan motor dari induk yaitu unit simpan pinjam. Oleh sebab itu, modal ditempatkan pada sisi pasiva unit usaha penjualan motor dan sisi aktiva pada neraca konsolidasi. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, hutang piutang antara induk dan anak harus dieliminasi. Jadi, perkiraan pengadaan sepeda motor sebaiknya dihilangkan.

Pembukuan yang dilakukan sedikit berbeda dengan teori, namun jumlah

pendapatan keduanya sama. Hal tersebut karena pengakuan pendapatan pada saat yang sama. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh dibawah ini:

Ilustrasi II:

Pada 4 November 2001 KPRI membeli sepeda motor dari *dealer* seharga Rp 12.000.000,00. Kas yang dipakai untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari pinjaman unit simpan pinjam. Satu hari kemudian sepeda motor tersebut disalurkan kepada anggota secara kredit selama satu tahun dengan bunga 3% menurun. Angsuran dibayar tiap bulan pada tanggal 5.

Pembukuan yang dilakukan berdasarkan teori pada landasan teori adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dibuat:

2001

4 Nov.	Kas	12.000.000	
	Hutang kepada Induk		12.000.000
	(Untuk mencatat peminjaman kepada induk)		
4 Nov.	Persediaan	12.000.000	
	Kas		12.000.000
	(Untuk mencatat pembelian sepeda motor secara kas)		
5 Nov.	Kas[1]	1.330.000	
	Piutang Kredit Sepeda Motor[3].....	12.650.000	
	Pendapatan Bunga		330.000
	Unearned Interest Revenue[2]		1.650.000
	Penjualan Sepeda Motor		12.000.000
5 Nov.	Harga Pokok Penjualan Sepeda Motor	12.000.000	
	Persediaan		12.000.000
5 Nov.	Penjualan Sepeda Motor	12.000.000	
	Harga Pokok Penjualan Sepeda Motor		12.000.000
	(Untuk mencatat penjualan sepeda motor secara kredit)		
5 Des.	Kas	1.300.000	
	Piutang Kredit Sepeda Motor[4]		1.300.000
	(Untuk mencatat angsuran dari anggota)		
5 Des.	*Unearned Interest Revenue*.....	300.000	
	Pendapatan Bunga		300.000
	(Untuk mengakui pendapatan bunga)		

Perhitungan:

[1] (12.000.000 : 12)+(3% x (12.000.000-1.000.000)) = 1.330.000

[2] (3% x 11.000.000)+ (3% x 10.000.000)+ (3% x 9.000.000)+...+ (3% x1.000.000) = 1.650.000

[3] (330.000 + 1.650.000 + 330.000) – 1.330.000 = 13.650.000

[4] (12.000.000 : 12)+(3% x (11.000.000-1.000.000)) = 1.300.000

Pada akhir tahun sebelum jurnal penutup, saldo *T-accounts*-nya adalah sebagai berikut:

Hutang kepada Induk

			12.000.000

Piutang Sepeda Motor

	12.650.000		1.300.000
Saldo	11.350.000		

Persediaan

	12.000.000		12.000.000

Harga Pokok Penjualan

	12.000.000		12.000.000

Pendapatan Bunga

			330.000
			300.000
		Saldo	630.000

Unearned Interest Revenue

	300.000		1.650.000
		Saldo	1.350.000

Kas

	12.000.000		12.000.000
	1.330.000		
	1.300.000		
Saldo	2.630.000		

Pembukuan yang dilakukan oleh KPRI tidak menggunakan jurnal. Untuk mempermudah pemahaman digunakan *T-accounts.*

Modal Pengadaan Sepeda Motor

		(1)	12.000.000

Piutang Sepeda Motor

(3)	12.000.000	(4)	1.000.000
Saldo	10.000.000	(5)	1.000.000

Persediaan

(2)	12.000.000	(3)	12.000.000

Buku Harian Kas

(1)	12.000.000	(2)	12.000.000
(4)	1.330.000		
(5)	1.300.000		
Saldo	2.630.000		

Pendapatan Sepeda Motor

		(4)	330.000
		(5)	300.000
		Saldo	630.000

Keterangan:
(1) meminjam uang kepada induk,
(2) membeli sepeda motor secara kas,
(3) menjual sepeda motor secara kredit kepada anggota,
(4) menerima angsuran pertama pada bulan November,
(5) menerima angsuran kedua pada bulan Desember.

Kedua metode diatas menghasilkan jumlah pendapatan yang sama. Pendapatan bunga yang diterima oleh KPRI disebut sebagai pendapatan sepeda motor, bukan pendapatan bunga. Penyebabnya karena pendapatan operasi utama unit ini berasal dari bunga atas piutang sepeda motor. Hal tersebut boleh dilakukan oleh KPRI.

Terdapat beban SHU yang disetor ke KSP. Beban ini berasal dari setoran sisa hasil usaha ditahan kepada induk. Perlakuannya seperti pembayaran dividen dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Dengan kata lain beban tersebut berasal dari arus keluar kepada pemilik. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut tidak memenuhi definisi beban.

Beban penyusutan aktiva dan beban-beban lainnya sudah diakui secara tepat. Beban-beban di atas menyebabkan penurunan aktiva berupa kas yang bukan disebabkan oleh kontribusi kepada pemilik.

C. Perlakuan Aktiva

1. Kas

Bentuk aktiva yang diakui sebagai kas sudah benar. Jumlah kas pada neraca merupakan saldo uang kas yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran, dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, dan juga simpanan dalam bank.

Kas telah dikategorikan secara benar yaitu sebagai aktiva lancar. Saldo kas yang tercantum benar-benar ada *(available)* dan tidak dibatasi penggunaannya. Kas yang dipisahkan pada kas dan bank tidak menimbulkan masalah karena kedua saldo tersebut direkonsiliasi. Penyimpanan kas di bank mempunyai kebaikan yaitu lebih aman dan sebagai alat pengendalian kas.

Saldo kas per tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp 108.609,00, sedangkan saldo hutang jangka pendeknya adalah Rp 1.906.519.635,00. Besarnya saldo kas sampai 1% dari saldo hutang jangka pendek. KPRI tidak menerapkan saldo minimum untuk kas dan tidak mempunyai *compensating balance.* Dengan tidak adanya saldo tersebut, maka KPRI kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi pelunasan hutangnya terutama hutang jangka pendek.

Terdapat beberapa sistem untuk mengendalikan kas. Secara umum pengendalian kas meniadakan akses atas pencatatan dari orang yang memegang kas. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan adanya pembukuan yang tidak sesuai untuk menyembunyikan penyalahgunaan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada KPRI tidak terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan pencatatan dan yang memegang kas. Hal tersebut menyebabkan pengendalian internalnya kurang baik.

KPRI telah melakukan pengendalian atas kas yang diterima. Pada saat kas diterima, kas tersebut sebelum dicatat pada Buku Harian Kas, terlebih dahulu dicatat pada kuitansi. Kuitansi yang *prenumbered* tersebut diisi dihadapan pihak yang

menerima kas. Pengendalian ini dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan kas yang diterima.

Pengendalian atas kas yang dikeluarkan juga dilakukan atas pengeluaran kas. Sebelum pengeluaran kas dicatat pada Buku Harian Kas, terlebih dahulu dicatat pada suatu *prenumbered voucher*. *Voucher* tersebut mencantumkan jumlah uang yang keluar dan kepada siapa kas dibayarkan. Kas benar-benar dapat keluar jika *voucher* tersebut telah diotorisasi oleh Bendahara II.

KPRI tidak melakukan *imprest fund* untuk uang kas yang dipegang oleh bendaharawan dan tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah kas yang dipegang. Hari kerja KPRI adalah enam hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu, sedangkan hari kerja bank adalah lima hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at. Perbedaan hari kerja KPRI dan bank serta tidak adanya jumlah minimal kas dapat menyebabkan KPRI kekurangan kas pada hari Sabtu. Apabila pada hari Sabtu diterima tagihan yang harus dibayar pada hari itu sedangkan saldo kas tidak mencukupi, maka pemegang kas akan memakai uang pribadinya.

2. Piutang

Piutang Jangka Pendek dan Piutang Jangka Panjang KPRI telah memenuhi definisi piutang yaitu tersebut merupakan klaim terhadap pihak lain. Pengklasifikasian piutang menjadi jangka pendek dan jangka panjang sudah benar.

Kegiatan utama KPRI adalah simpan pinjam. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh bunga dari pinjaman anggota. Unit simpan pinjam mencatat pendapatan berdasarkan atas basis kas dimana pendapatan bunga dicatat sebagai pendapatan jika kas sudah diterima. Pada akhir tahun tidak ada pengakuan akan bunga akrual dan piutang bunga. Oleh karena itu, jumlah saldo piutang jangka pendek menjadi lebih kecil dibandingkan dengan apabila pembukuan dilakukan berdasarkan basis akrual. Untuk lebih jelasnya lihat kembali Ilustrasi I.

Dalam neraca konsolidasi pada aktiva lancar terdapat perkiraan Pengadaan Sepeda Motor. Perkiraan tersebut berasal dari pinjaman kepada Unit usaha penjualan Motor yang digunakan untuk membeli sepeda motor. Dengan kata lain, perkiraan tersebut merupakan pinjaman induk kepada anak. Perkiraan tersebut jika dikonsolidasi menjadi kurang memenuhi definisi hutang yaitu klaim terhadap pihak lain. Unit usaha penjualan motor bukanlah pihak yang dapat disebut sebagai pihak lain. Saldo piutang terhadap anak harus dieliminasi dari neraca konsolidasi. Apabila piutang tersebut tidak dihilangkan maka informasi yang disajikan menjadi kurang handal karena aktivanya *overstated*, lebih besar daripada seharusnya.

Neraca Unit usaha penjualan Motor per tanggal 31 Desember 2001 mencantumkan adanya piutang dari penyaluran sepeda motor sebesar Rp 104.469.700,00. Piutang tersebut tidak dimunculkan dalam neraca konsolidasi. Informasi keuangan tentang aktiva yang disajikan menjadi kurang handal karena

piutang tersebut tidak ditambahkan dalam neraca konsolidasi. Nilai tercatat aktiva menjadi lebih rendah daripada seharusnya.

Metode penyusutan yang diterapkan adalah metode penghapusan langsung *(direct write-off)*. Piutang dicatat sebagai piutang tak tertagih apabila piutang tersebut benar-benar tidak tertagih. Beban piutang tak tertagih dicatat sebagai Beban Dana Resiko Kredit.

Metode penghapusan langsung secara teoritis kurang baik karena biasanya tidak dapat menandingkan biaya dengan pendapatan pada periode yang sama. Beban piutang tak tertagih kemungkinan diakui pada periode yang berbeda dengan periode dimana penghasilan diperoleh. Metode tersebut menyebabkan piutang dalam neraca tidak disajikan pada perkiraan nilai yang dapat direalisasikan *(estimated realizable value)*.

Terdapat Perkiraan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atau Angsuran yang Belum Disetor yang lebih tepat dikategorikan sebagai piutang. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan akrual atau pendapatan yang telah dihasilkan namun belum dicatat dalam perkiraan. Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari angsuran yang belum disetorkan. Pendapatan yang Masih Harus Diterima tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang karena merupakan klaim dalam bentuk uang kepada pihak lain.

3. Investasi Jangka Panjang

Investasi pada perusahaan lain dicatat dengan metode harga pokok *(cost method)*. Dalam landasan teori dijelaskan bahwa investasi jangka panjang harus dicatat pada neraca berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen.

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi merupakan ekuitas koperasi. Simpanan-simpanan tersebut merupakan bukti kepemilikan suatu pihak atas koperasi, mirip dengan saham namun mempunyai beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah besarnya saham pada perseroan terbatas menentukan hak suara dalam rapat umum pemegang saham sedangkan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak menentukan hak suara dalam rapat anggota. Sebesar apapun penanaman modal pada koperasi, penanaman modal tersebut tidak akan mempengaruhi pengaruh atau kontrol terhadap koperasi. Oleh karena itu, penanaman modal pada koperasi harus dicatat berdasarkan metode harga pokok.

KPRI mencatat investasinya berdasarkan biaya perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Harga perolehan simpanan sama dengan nilai nominal. Berdasarkan metode harga pokok, investasi dicatat berdasarkan harga perolehan atau harga pasar, mana yang lebih rendah *(lower-of-cost-or-market)*. Karena harga pasar dari simpanan-simpanan tersebut sulit untuk diperoleh,

maka atas nilai investasi tidak dilakukan penyesuaian.

Salah satu investasi yang dimiliki adalah Surat Berharga Persijap. Surat berharga ini mirip dengan obligasi namun jumlah bunga yang dijanjikan tidak tecantum secara jelas. Harga pasar surat berharga ini juga sulit untuk ditentukan. Nilai yang tercantum pada neraca merupakan harga perolehan tanpa adanya penyesuaian.

Investasi dalam bentuk simpanan tidak dapat diperjualbelikan. Penghasilan yang diharapkan berasal dari SHU dan bunga. Penghasilan lainnya seperti *capital gain* tidak dapat diharapkan untuk diterima. *Return* yang diberikan oleh simpanan-simpanan tersebut tidak diberikan secara periodik. Apabila simpanan-simpanan tersebut memberikan *return* kepada KPRI, *return* tersebut tidak diterima dalam bentuk kas tetapi dianggap penambahan saldo simpanan. Jadi, nilai investasi akan berubah dalam hal ini akan naik jika diperoleh *return*, dan nilainya tidak akan turun karena ketiadaan nilai pasar investasi. Pencatatan tersebut sudah benar.

4. Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari tanah, gedung, dan inventaris. Aktiva tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dikelompokkan sebagai aktiva tetap, yaitu:

1) berwujud, aktiva tetap yang dimiliki mempunyai wujud pasti. Tanah, gedung, dan inventaris yang dimiliki dapat dilihat bentuknya, dapat diraba dan dirasakan keberadaannya;
2) digunakan untuk kegiatan normal, aktiva tetap digunakan untuk operasi normal perusahaan. Tanah beserta gedung digunakan untuk kantor perusahaan. Inventaris kantor seperti lemari arsip, meja kerja, komputer dan inventaris lainnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan tujuan pemilikan ini sudah ada dalam pengertian aktiva tetap perusahaan;
3) tidak dimaksudkan untuk dijual. Tanah, gedung, dan inventaris diperoleh untuk mendukung kegiatan operasi KPRI bukan untuk dijual kembali;
4) mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut kemungkinan besar dapat diterima;
5) biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Biaya perolehan tanah, gedung, dan inventaris dapat diukur dengan andal.

Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian disajikan menurut harga beli yang tercantum pada kuitansi atau faktur pembelian. Hal tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Nilai yang tercantum pada nilai aktiva akan berbeda dengan yang seharusnya jika KPRI tidak memasukkan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktiva tetap yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan tersebut misalnya adalah PPN, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal *(initial delivery)*, biaya bongkar muat

(handling cost), dan biaya pemasangan *(installation cost)*. Apabila biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh KPRI, tetapi tidak dimasukkan dalam kuitansi atau faktur, maka nilai tercatat aktiva tetap menjadi terlalu rendah *(understated)*. Biaya-biaya tersebut dibebankan pada periode dimana kas dikeluarkan, akibatnya beban usaha pada periode tersebut menjadi terlalu tinggi *(overstated)* dan selanjutnya sisa hasil usaha periode tersebut akan disajikan terlalu rendah *(understated)*.

Hal sebaliknya juga dapat terjadi. Apabila dalam kuitansi atau faktur pembelian tercantum biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada aktiva tetap maka nilai tercatat aktiva tetap menjadi terlalu tinggi *(overstated)*. Akibatnya, beban usaha pada periode tersebut menjadi terlalu rendah *(understated)* dan selanjutnya sisa hasil usaha periode tersebut akan disajikan terlalu rendah *(understated)*.

Dalam perkiraan gedung terdapat bangunan wartel tercatat Rp 28.061.600,00. Nilai tersebut berasal jumlah semua kas yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bangunan, biaya transportasi dan biaya tenaga kerja yang terpakai. Tidak termasuk didalamnya biaya desain atau gambar gedung senilai Rp 2.000.000,00. Biaya profesional arsitek tersebut merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada kepada bangunan wartel. Oleh karena itu, biaya tersebut seharusnya dimasukkan dalam biaya perolehan gedung.

Biaya desain gedung yang tidak dikapitalisasi mempunyai dampak kepada pelaporan keuangannya. Harga perolehan gedung menjadi tersaji terlalu rendah sebesar Rp 2.000.000,00. Seharusnya nilai yang tercantum sebagai biaya perolehan gedung wartel adalah Rp 30.061.600,00 bukan Rp 28.061.600,00. Biaya jasa arsitek tersebut dibebankan pada tahun 2001. Hal tersebut membuat biaya operasional KPRI tersaji lebih rendah Rp 2.000.000,00. Akibatnya, sisa hasil usaha pada tahun 2001 menjadi tersaji lebih rendah Rp 2.000.000,00.

Dana pembangunan gedung diantaranya berasal dari simpanan pembangunan gedung yang dihimpun dari anggota. Atas penyimpanannya tersebut penyimpan diberikan jasa. Simpanan yang telah terkumpul, tetapi belum direalisasikan dalam pembangunan gedung digunakan sebagai modal usaha. Berdasarkan teori pada Landasan teori, beban jasa yang diberikan pada penyimpan tersebut setelah harus dikapitalisasikan dalam biaya perolehan gedung.

Pengeluaran–pengeluaran setelah perolehan gedung yang digunakan untuk penambahan fisik gedung dan pengembangan lingkungannya seperti pengembangan tempat parkir dimasukkan dalam Beban Pembangunan Gedung. Penambahan fisik gedung merupakan pengeluaran yang kemungkinan akan mengalirkan manfaat pada masa depan. Biaya yang dikeluarkan juga dapat diukur dengan handal. Demikian pula dengan pengembangan tempat parkir. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai aktiva. Pengeluaran-pengeluaran untuk penambahan fisik gedung lebih tepat jika dimasukkan dalam nilai gedung. Pengeluaran-pengeluaran untuk pengembangan sarana parkir lebih tepat dibuatkan perkiraan sendiri pada

aktiva tetap yaitu dicatat sebagai *Land Improvement*.

Pencatatan biaya-biaya tersebut sebagai Beban Pembangunan Gedung membawa dampak terhadap pelaporan keuangannya. Nilai aktiva tetap pada neraca menjadi terlalu rendah, sedangkan beban usaha pada periode tersebut menjadi terlalu tinggi. Akibatnya, sisa hasil usaha yang diperhitungkan pada periode tersebut menjadi terlalu rendah.

Pengeluaran–pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap, yang berupa beban-beban untuk perbaikan dan perawatan telah dicatat dengan benar. Pengeluran-pengeluaran diakui sebagai beban pemeliharaan pada periode kas dikeluarkan. Kas yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tersebut kemungkinan kecil akan mengalirkan manfaat di masa datang. Manfaat yang diberikan tidak lebih dari satu tahun.

Pencatatan atas aktiva yang dilepaskan sudah benar. Aktiva tetap yang dilepaskan tersebut, seluruh harga perolehan beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pembukuan aktiva tetap. Karena aktiva yang dilepaskan adalah aktiva yang sudah tidak dapat memberikan manfaat keekonomian lagi dan tidak mempunyai nilai sisa maka aktiva tersebut biasanya dibuang. Oleh karena itu, pelepasan aktiva tersebut tidak diakui adanya laba atau rugi.

KPRI telah melakukan penyusutan atas gedung dan inventarisnya kecuali inventaris pada unit wartel. Unit wartel mempunyai aktiva tetap berupa inventaris senilai Rp 10.624.000,00 namun unit ini tidak melakukan penyusutan atas inventaris tersebut. Manfaat inventaris pada wartel akan semakin berkurang seiring dengan berlalunya waktu. Nilai keekonomian inventaris juga akan berkurang seiiring dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, nilai inventaris wartel juga harus disusutkan. Sebagai akibat dari inventaris yang tidak disusutkan, nilai inventaris tersebut menjadi terlalu tinggi, nilai beban operasi menjadi terlalu rendah dan jumlah SHU menjadi terlalu tinggi.

Gedung wartel juga tidak disusutkan. Bangunan tersebut selesai dibangun pada akhir Desember 2001 dan dipakai untuk operasi wartel mulai awal Januari 2002. Perlakuan tersebut sudah benar. Gedung wartel tersebut selama tahun 2001 tidak mengalami penurunan manfaat keekonomian.

Masa manfaat dan nilai sisa aktiva ditentukan berdasarkan masa kegunaan yang diharapkan oleh KPRI. Estimasi masa manfaat tersebut ditentukan oleh pengurus berdasarkan pengalaman atas aktiva yang sejenis. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK no. 16.

KPRI menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua bangunan dan inventaris yang disusutkan. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus mengalokasikan beban penyusutan yang sama tiap tahun. Pola pemanfaatan aktiva yang disusutkan sama tiap tahun. Jadi, penggunaan metode tersebut sudah sesuai dengan teori pada landasan teori.

D. Perlakuan Kewajiban

KPRI telah membedakan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2001, kewajiban yang ada hanyalah kewajiban jangka pendek. Hampir 95% kewajiban jangka pendek berupa Tabungan Koperasi. Tabungan Koperasi merupakan simpanan yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebgai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan tersebut tidak mempunyai karakteristik sebagai ekuitas. Tabungan tersebut telah disajikan sesuai kewajiban KPRI kepada pemilik tabungan yang sama dengan nilai nominalnya. Pencatatan tabungan tersebut telah sesuai dengan PSAK no. 27.

Dalam perkiraan kewajiban jangka pendek terdapat perkiraaan Dana Anggota, Dana Pengurus, Dana Karyawan, Dana Pendidikan, Dana Sosial, dan Dana Perkoperasian. Dana-dana tersebut berasal dari pembagian SHU. Dana-dana tersebut merupakan dana dari pembagian SHU yang tidak menjadi hak koperasi yang telah dicatat sebesar nilai nominalnya. Perlakuan dana-dana tersebut sudah sesuai dengan PSAK no. 27.

Dana Promosi Tabungan pada sisi kewajiban menunjukkan adanya jumlah kewajiban untuk membayar promosi tabungan. Promosi tabungan yang belum dibayar secara lunas belum diakui sebagai beban sampai dengan kas dikeluarkan. Klasifikasi dana tesebut sebagai kewajiban sudah benar. Promosi tabungan tersebut menimbulkan kewajiban kepada KPRI untuk mengeluarkan kas pada suatu saat.

Salah satu perkiraan yang disajikan sebagai kewajiban jangka pendek adalah Dana Penyisihan Pembangunan Gedung. Dengan memasukkan perkiraan tersebut pada kewajiban jangka pendek berarti KPRI mempunyai kewajiban untuk mendirikan gedung paling lama satu tahun yang akan datang. Pada kenyataannya KPRI tidak mempunyai kewajiban untuk membengun gedung tiap tahun. Oleh karena itu, dana tersebut kurang tepat jika dimasukkan dalam kewajiban jangka pendek.

Simpanan Mana Suka telah dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan ini memiliki karakteristik seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan tersebut tidak dapat diambil selama anggota menjadi anggota koperasi. Perbedaannya adalah besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib telah ditentukan oleh KPRI, sedangkan besarnya simpanan mana suka sekehendak anggota. Simpanan mana suka juga berfungsi sebagai penutup resiko dan sifatnya tidak sementara, jadi lebih tepat jika dimasukkan dalam ekuitas.

Kompensasi simpanan anggota merupakan kewajiban koperasi untuk memberi *return* atas simpanan anggota. Kompensasi tersebut dicatat sebagai kewajiban jangka pendek, karena pemberian kompensasi tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan KPRI mengeluarkan kas dalam jangka pendek. Nilai yang dicatat pada neraca sebesar nilai nominal. Pengklasifikasian kompensasi tersebut sebagai kewajiban jangka pendek sudah benar. Nilai yang dicatat juga sudah benar.

Pada sisi kewajiban jangka panjang terdapat perkiraan seragam anggota. Sepintas perkiraan ini berupa aktiva yaitu benda berwujud yang berupa seragam.

Perkiraan tersebut merupakan beban pembelian seragam yang belum dilunasi pembayarannya. Kewajiban tersebut telah dicatat sebesar nilai nominalnya. Hutang seragam anggota tersebut harus dibayar dalam jangka pendek. Perlakuan akuntasi tersebut sudah benar, namun akan menjadi lebih baik jika ditambahkan hutang didepan nama perkiraannya menjadi hutang seragam anggota.

Perkiraan pajak yang harus dibayar telah dicatat dalam hutang pajak. Pajak yang terutang tersebut merupakan pajak penghasilan. Jumlah pajak yang dicatat adalah sebesar nilai yang diperkirakan akan dibayar. Perlakuan akuntansi tersebut sudah benar.

E. Perlakuan Ekuitas

Simpanan wajib khusus merupakan simpanan yang tidak disetorkankan secara langsung oleh anggota namun berasal dari SHU, jasa, dan/atau THR yang tidak diambil oleh anggota. Simpanan ini mempunyai karakteristik seperti ekuitas, yaitu tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi dan ikut menanggung resiko. Nilai yang tercatat adalah sebesar nilai nominal simpanan. Simpanan ini sudah dicatat dengan benar yaitu sebagai ekuitas yang dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan pembangunan gedung dapat diambil oleh anggota sebelum yang bersangkutan keluar dari koperasi. Simpanan yang dicatat sebesar nilai nominalnya ini merupakan salah satu sumber pembiayaan KPRI dalam membangun gedung. Simpanan ini tidak ikut menanggung resiko, dan bersifat seperti pinjaman kepada anggota. Karenanya, simpanan ini lebih tepat jika dikategorikan sebagai kewajiban.

Simpanan pokok dan simpanan wajib telah dicatat dengan benar. Simpanan-simpanan tersebut berfungsi sebagai penutup resiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam PSAK no. 27 dijelaskan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. KPRI telah mengakui simpanan-simpanan tersebut sebagai ekuitas dan telah dicatat sebesar nilai niminalnya.

Karyawan KPRI mempunyai simpanan hari tua pada KPRI. Simpanan ini dapat diambil jika karyawan keluar dari KPRI. Simpanan ini tidak ikut menanggung resiko. Oleh karena itu, simpanan ini lebih tepat dimasukkan dalam perkiraan kewajiban.

Modal yang berasal dari sumbangan atau Modal Donasi, diakui pada saat penyerahan kepemilikan sebesar nilai nominal yang diterima. Selain memperoleh modal dari anggota, koperasi juga menerima modal dari sumbangan. Sumbangan yang diterima tidak ada yang beserta persyaratan tertentu yang dipersyaratkan oleh penyumbang. Modal yang berasal dari sumbangan ini ikut menanggung resiko. Nilai yang dicatat sebesar nilai nominalnya. Perlakuan akuntansi tersebut sudah benar.

Kompensasi simpanan anggota merupakan modal yang sudah disisihkan untuk pemberian kompensasi atas simpanan anggota. Dengan melakukan penyisihan

modal, KPRI belum mempunyai kewajiban untuk membayar kompensasi tabungan kepada anggota. Kompensasi tersebut ikut menanggung resiko. Perlakuan kompensasi anggota sebagai ekuitas tersebut sudah benar.

Modal koperasi juga disisihkan sebagian untuk menutup terjadinya beban piutang tak tertagih. Nama perkiraannya adalah Dana Resiko Kredit. Dana resiko kredit ini ikut menanggung resiko. Oleh karena itu, penggolongannya sebagai ekuitas sudah benar.

Modal koperasi yang belum disisihkan atau diapropriasikan dicatat sebagai Dana Cadangan. Setiap hari raya, karyawan memberikan THR kepada anggotanya. Pemberian THR tersebut besarnya tidak tergantung pada besarnya simpanan atau tabungan anggota. THR tersebut hakekatnya adalah sebagai distribusi kepada pemilik dalam hal ini adalah anggota koperasi. Oleh karena itu, pemberian THR tersebut seharusnya dibebankan pada cadangan, bukan pada beban operasi. Pembebanan pembayaran THR kepada anggota kepada beban usaha periode berjalan mengakibatkan jumlah beban pada periode tersebut menjadi terlalu tinggi dan akibatnya SHU yang dihitung menjadi terlalu rendah.

Kepada anggota yang keluar, KPRI memberikan menetapkan pembayaran tambahan selain pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya. Pembayaran tambahan tersebut tergantung pada berapa lama yang bersangkutan menjadi anggota. Pembayaran tersebut dicatat sebagai beban kompensasi simpanan anggota. Pencatatan tersebut kurang sesuai dengan PSAK no. 27. Dalam PSAK tersebut disebutkan bahwa pembayaran kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan. Sebagai akibat dari perlakuan tersebut, jumlah beban usaha menjadi terlalu tinggi. Beban usaha yang terlalu tinggi tersebut mengakibatkan jumlah SHU tahun yang bersangkutan tersaji terlalu rendah.

F. Laporan Keuangan Koperasi

KPRI telah memenuhi sebagian ketentuan laporan keuangan koperasi yang tertera pada PSAK no. 27. Menurut PSAK tersebut, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. KPRI telah menyusun Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Laporan lainnya yang dapat ditemukan adalah Laporan Arus Kas. Laporan arus kas tersebut disusun oleh Kantor Akuntan Publik yang memeriksa.

Neraca telah disusun dengan format yang benar. Neraca tersebut telah menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas KPRI per tanggal 31 Desember. Neraca disajikan dalam perbandingan dua tahun terakhir.

Penyajian perhitungan hasil usaha KPRI kurang sesuai dengan yang dipersyaratkan pada PSAK no. 27. KPRI tidak membedakan pendapatannya antara

dari anggota dan non-anggota. Sebagai akibatnya, Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang disusun tidak memisahkan antara pendapatan dari anggota dan non-anggota. Beban-beban koperasi yang yang timbul juga tidak dibedakan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Berdasarkan PSAK no. 27, perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha anggota dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Beban-beban yang ada juga harus dipisahkan antara beban usaha dengan beban-beban perkoperasian.

KPRI belum menyusun laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Meskipun demikian laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan perhitungan hasil usaha disajikan cukup rinci. Laporan-laporan tersebut didukung dengan neraca lajur yang juga dilampirkan. Neraca didukung oleh daftar piutang simpanan jangka pendek, daftar piutang simpanan jangka panjang, daftar inventaris, daftar sisa piutang sepeda motor, daftar tabungan umum koperasi, dan daftar simpanan anggota. Laporan perhitungan usaha didukung dengan daftar perincian pendapatan dan biaya-biaya. Dengan laporan yang cukup rinci tersebut, pengguna dapat menilai pertanggungjawaban pengurus dengan lebih baik.

Semua unit usaha membuat laporan keuangan. Laporan keuangan unit usaha wartel berupa neraca lajur dan tabel pendapatan dan pengeluaran keuangan. Laporan keuangan unit usaha penjualan sepeda motor terdiri dari neraca lajur, neraca, laporan penghitungan hasil usaha, laporan perubahan modal, dan daftar inventaris. Laporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit-unit usaha tidak selalu sama. Akibatnya pada waktu konsolidasi tidak mudah untuk dilakukan. Selain itu, pengguna laporan juga agak kesulitan untuk menganalisis dan membandingkan laporan keuangan anak.

Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus terdapat daftar piutang simpanan jangka pendek, daftar piutang simpanan jangka panjang, daftar sisa piutang sepeda motor, daftar tabungan umum koperasi, dan daftar simpanan anggota. Daftar piutang memuat nama peminjam dan jumlah pinjamannya. Anggota dapat memeriksa dan mencocokkan jumlah hutangnya dengan daftar piutang tersebut. Pada lain pihak anggota juga dapat melihat pinjaman anggota lain. Namun kemungkinan ada beberapa anggota yang berkeberatan jumlah hutangnya dipublikasikan.

Hal yang sama juga pada penyimpan dan penabung. Daftar simpanan dan daftar tabungan memuat daftar simpanan dan tabungan masing-masing anggota. Anggota dapat memeriksa dan mencocokkan jumlah simpanan dan tabungannya. Anggota juga dapat melihat daftar tabungan anggota lain. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika ada anggota yang keberatan jika tabungan dan simpanannya dipublikasikan. Alternatifnya, KPRI dapat membuat format laporan yang informatif tanpa mencantumkan nama anggota beserta jumlah simpanan, tabungan, dan hutangnya. Sebagai perbandingan, dalam undang-undang perbankan, nasabah dan simpanannya merupakan rahasia bank yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain.

KPRI belum menyusun menyusun laporan promosi ekonomi anggota. Dengan belum adanya laporan tersebut maka KPRI belum melaporkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha.

KPRI juga belum memberikan catatan atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan tidak mengetahui tentang pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan tersebut biasanya memuat tentang perlakuan akuntansi seperti pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota dan informasi lainnya.

VI. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Basis akuntansi yang digunakan adalah campuran antara basis kas dengan basis akrual. Basis kas digunakan untuk mencatat pendapatan. Namun sebagian besar masih menggunakan basis kas. Penggunaan tersebut menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dengan jika memakai basis akrual terutama terjadi unit usaha simpan pinjam tidak adanya pengakuan bunga secara akrual pada akhir tahun.
2. Metode pembukuan penjualan kredit sepeda motor menghasilkan jumlah pendapatan yang sama. Jumlah pendapatan tersebut sama karena pengakuan pendapatan dilakukan pada saat yang sama, yaitu pada saat kas diterima. Metode penghapusan langsung secara teoritis kurang baik karena biasanya tidak dapat menandingkan biaya dengan pendapatan pada periode yang sama. Metode tersebut menyebabkan piutang dalam neraca tidak disajikan pada perkiraan nilai yang dapat direalisasikan *(estimated realizable value)*.
3. Pada akhir tahun KPRI tidak mengakui adanya piutang bunga. Piutang bunga pada akhir tahun muncul karena adanya pengakuan pendapatan bunga akrual. KPRI tidak mengakui adanya pendapatan bunga akrual. Bunga akan diakui jika kas diterima.
4. Secara umum, pencatatan kewajiban sudah benar. Kewajiban tersebut dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Pengkategorian kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek juga sudah benar. Hanya ada satu perkiraan yang lebih tepat dimasukkan ke ekuitas karena memiliki karakteristik sebagai ekuitas. Perkiraan tersebut adalah simpanan mana suka.
5. Ekuitas sebagian dicatat dengan tepat dan sebagian lagi kurang tepat. Simpanan wajib khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, modal donasi, kompensasi simpanan anggota, dana resiko kredit, dan dana cadangan telah dicatat dengan benar. Perkiraan lainnya, yaitu simpanan pembangunan gedung, dan simpanan

hari tua karyawan kurang tepat dikategorikan sebagai ekuitas karena tidak ikut menanggung resiko.

VII. Daftar Pustaka

Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting.* Edisi ke-7. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Dreblin, Allan R., *Advanced Accounting.* Edisi ke-5. Jakarta: Binarupa Aksara, 1989.

Fees, Philiph E. Dan Carl S. Warren. *Accounting Principles.* Edisi ke-17. Cincinnati: South-Western Publishing Co., 1993.

Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi.* Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1999.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999.

Kieso, Donald E. Dan Jerry J. Weygrant. *Intermediate Accounting.* Edisi ke-9. New York: John Wilwy & Sons, Inc, 1998.

Smith, Jay M. Dan K. Fred Skousen. *Intermediate Accounting.* Edisi ke-11. Cincinnati: South-Western Publishing, 1992.

Sugijanto, Robert Gunardi, dan Sonny Loho, *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba.* Malang: PPA FE Unbra, 1995.

Tunggal, Amin Widjaja. *Akuntansi Untuk Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.